

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan ialah salah satu perkara yang tidak pernah luput dari kepedulian pemerintah sesuatu negeri dibelahan dunia manapun. Kemiskinan apalagi jadi perkara fenomenal dalam bidang ekonomi yang jadi titik acuan keberhasilan pemerintah sesuatu negeri dari waktu ke waktu, terlebih pada wilayah yang lagi tumbuh.

(Haughton, Shahidur R dan Khandker, 2012) berpendapat bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada di atas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan dipengaruhi berbagai hal yang saling berkaitan.

Angka tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Gresik terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,33%, sedangkan angka tingkat kemiskinan terendah di Kabupaten Gresik terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,09%. Dari tahun ke tahun angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu 15,33% sampai tahun 2020 yaitu 11,09%

Kondisi kemiskinan yang terjadi didasari oleh ketidakmampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mereka dan bisa juga terjadi akibat kurang maksimalnya program pemerintah dalam memberikan bantuan pengkulangan kemiskinan (Haughton, Shahidur R dan Khandker, 2012)

Peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menjadi tidak miskin sangat penting. Dalam menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan), kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tertuang pada anggaran yang dikeluarkan. (Mangkoesobroto, 1993) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu fungsi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada fungsi tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah, dalam konteks kebijakan fiskal, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan

Menurut Nelson dan Leibstein dikutip dari (Sukirno, 2010) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat

tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran dan berdampak buruk dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang berimbas kepada kemiskinan. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik yang telah dibangun di wilayah kabupaten Gresik. Seharusnya dengan pesatnya pertumbuhan industri ini dibarengi juga dengan menurunnya angka tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di kabupaten Gresik. Namun realitanya angka tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di kabupaten Gresik masih cukup tinggi bila dibandingkan

dengan daerah lain, pasalnya kota Gresik adalah kota industri yang semestinya memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan bisa dijangkau oleh masyarakat kabupaten Gresik sendiri sehingga sumber daya manusia dapat tertampung dan digunakan dengan baik. Faktanya angka tingkat pengangguran di kabupaten Gresik masih dalam angka yang cukup tinggi yakni mencapai puluhan ribu orang. Tingginya angka tingkat pengangguran di kabupaten Gresik ini berhubungan dengan tingginya angka tingkat kemiskinan di kabupaten Gresik karena banyaknya tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab tingkat kemiskinan. Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tentunya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya terlebih lagi jika memiliki banyak beban tanggungan dalam keluarganya. Menurut data, tercatat sebanyak 168 ribu warga miskin di kabupaten Gresik. Jumlah ini masih tergolong cukup tinggi yaitu sekitar 12,89 persen dari hampir 1,4 juta jiwa penduduk di kabupaten Gresik. Tingginya angka tingkat kemiskinan ini menunjukkan ukuran kesejahteraan masyarakat yang dinilai dalam tingkatan yang tergolong rendah.

Penulis memilih penelitian di Kabupaten Gresik dikarenakan beberapa tahun belakangan ini daerah Kabupaten Gresik banyak mengalami perubahan terutama dalam sisi pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu menyebabkan penulis tertarik memilih daerah tersebut untuk melakukan penelitian. Sehingga diharapkan pembangunan di daerah Kabupaten Gresik dapat memberikan dampak yang besar terhadap sektor-sektor lain begitu pula dengan Tingkat Kemiskinan yang seharusnya dapat di minimumkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya diimbangi oleh minimnya tingkat kemiskinan. Penelitian ini difokuskan dengan melibatkan variable pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Periode tahun yang digunakan adalah tahun 2006 sampai tahun 2020 atau selama 15 tahun.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Gresik.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup atau pembahasan yang sama.